
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Teguh Ansori¹

¹Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia
correspondence e-mail teguhanshory586@gmail.com

Submitted: Revised: 02/04/2023 Accepted: 12/04/2023 Published: 22/04/2023

Abstract

This article aims to describe the concept and implementation of community empowerment in the context of Islamic economics. Community empowerment has an important impact in achieving the sustainable development goals, and a better understanding of. Community empowerment is a solution to the inequality and powerlessness felt by some people by the oppression of the powerful. Western economies provide no answer to this powerlessness. In an economic perspective, Islam provides a solid foundation to guide empowerment efforts. This research method is qualitative descriptive taken from several literatures. This research explores relevant Islamic economic principles, community empowerment implementation strategies, and their impact on economic and social well-being. The results of this study show that community empowerment in an Islamic perspective must use several instruments, namely zakat, infak, shodaqah, and waqf.

Keywords

Community Empowerment, Islamic Economy, Zakat, Infak, Shodaqah, Waqf



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab dan perbincangan pertumbuhan ekonomi Negara, yang artinya negara harus memberikan jaminan kesejahteraan kepada penduduknya secara adil dan tepat sasaran. Konsep kedejahteraan rakyat ini tertuang dalam Pancasila dan Undang-undang 1945. Isi dalam konsep tersebut sebagaimana pada pembukaan undang-undang alenia ke empat. Bahwa negraa melindungi segenap bangsa dan seluruh tupah darah inonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Konsep ini harus dijalankan sesuai amanat yang tertulis dalam undang-undang dalam rangka kesejahteraan penduduk.

Salah satu cara mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalah dengan adanya program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dicanangkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang ada di suatu negara. Pada dekade terakhir

ini, kemiskinan menjadi topik yang dibahas dan dan menjadi topik perbincangan di forum nasional maupun internasional. Kalau dilihat dari faktanya sebenarnya kemiskinan itu sendiri telah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Solusi yang selama ini di suguhkan belum menjawab masalah kemiskinan yang selama ini dihadapi, bahkan kemiskinan semakin meningkat terlebih di negara berkembang.

Arti yang lebih dikenal dikalangan masyarakat bahwa kemiskinan adalah dimana seseorang dalam keadaan kekurangan, baik kekurangan uang maupun barang untuk keberlangsungan hidup. Sementara dalam artian yang luas bahwa kemiskinan suatu konsep yang mana dalam konsep tersebut ada lima kriteria. Kriteria-kriteria tersebut adalah kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan dalam situasi sosial, tergantung pada yang lain, dan terpinggirkan secara wilayah maupun secara sosial budaya¹.

Menjalani kehidupan pada situasi kemiskinan artinya tidak hanya menjalani kehidupan dalam kekurangan uang dan penghasilan rendah. Tetapi situasi kehidupan pada kemiskinan itu harus diartikan lebih luas, seperti tingkat Kesehatan rendah, tingkat Pendidikan rendah, kurang keadilan dalam hukum, terancam dalam kejahatan, ketidakberdayaan dalam menghadapi penguasa maupun mengnentukan kehiduapan. Setidaknya ada empat pembagian dalam kemiskinan, pertama kemiskinan absolut, dimana seseorang berpendapatan rendah dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hiudp utamanya kebutuhan pangan, sandang, Kesehatan dan tempat tinggal. Kedua kemiskinan relatif, yakni kemiskinan karena factor kebijakan yang tidak sejalan dengan kehidupan masyarakat, atau factor pembangunan yang belum menyentuh rata terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga mempengaruhi pendapatan di kalangan masyrakat. Ketiga kemiskinan kultural, kemiskinan yang disebabkan oleh factor sosial budaya yang ada di masyarakat. Kemiskinan ini seperti pengaruh factor kehidupan masyarakat malas, konsumtif, dan tidak memiliki kreatifitas menciptakan hasil yang bernilai ekonomi meskipun sudah di bantu dari beberapa pihak. Keempat kemiskinan structural, faktor kemiskinan yang disebabkan oleh system yang tidak bisa di hindari seperti sosial budaya dan sosial politik. Kemiskinan ini malah meningkat dari tahun ke tahun.

Selain diklarifikasikan menjadi empat bagian diatas ada juga yang mengklarifikasi berdasarkan jenis pembentukannya. Berdasarkan jenis pembentukannya dibedakan menjadi dua yakni kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiyah dikarenakan sumber daya alam yang sulit dan bahkan langka untuk di dapatkan. Sumber daya alam dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi Sebagian masyarakat. Sementara kemiskinan buataak dikarenakan factor moderenisasi dan pembangunan yang tidak memikirkan nasib masyarakat. Sehingga masyarakat tidak bisa menguasai asset-aset yang

¹ Chriswardani Suryawati, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional," *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 8, no. 03 (2005).

dimiliki seperti sarana umum, sumberdaya alam, dan tidak adanya pemerataan ekonomi².

Kemiskinan yang telah ada ini menjadi tanggung jawab negara menurut Undang-undang. Namun dalam ajaran islam, kemiskinan atau golongan yang kurang beruntung ini menjadi suatu tanggung jawab orang-orang yang kaya. Ada beberapa cara yang ditawarkan dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memberikan kekuatan kepada mereka yang kurang beuntuk agar dalam kehidupannya lebih layak dan terangkat derahjatnya. Konsep pemberdayaan masyarakat ini sebenarnya sudah lama menjadi program pemerintah yang tujuannya adalah pengentasan kemiskinan. Kalau selama ini kita mengenal pemberdayaan masyarakat menjadi programnya pemerintah, lantas bagaimana program pemberdayaan masyarakat ini dalam kajian ekonomi islam.

Metode

Penelitian ini adalah tinjauan pustaka bertujuan untuk menggali informasi yang relevan tentang tema pemberdayaan Masyarakat dalam persepektif ekonomi islam Penelitian ini dimulai dengan identifikasi sumber- sumber literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang sesuai dengan pembahasan. Selanjutnya, proses membaca dan menganalisis secara kritis konten dari setiap sumber yang terpilih dilakukan untuk mengidentifikasi. Adapun jenisnya adalah kualitatif deskriptif yang menghasilkan penjabaran dan pendeskripsian tentang pembahasan³.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Kegagalan konsep pembangunan yang canangkan oleh pemerinth pada masa orde baru dan di negara-negara berkembang khususnya di Asia memunculkan suatu gagasan yang mempunyai cita-cita berupa kesejahteraan masyarakat. Kosep yang di usung ini adalah pemberdayaan masyarakat atau disebut juga dengan social empowerment. Pembangunan yang diusung sebelumnya berpatokan pada industrialisasi dan modernisasi sebagaimana konsep ini dalam paradigma ekonomi neoklasi sebagai pijakan dalam menjalankan suatu gagasannya. Dengan paradigma neoklasiknya ternyata tidak memberikan efek yang dirasakan kepada masyarakat, akan tetapi memberikan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Pemberdayaan di gagas dalam rangka melawan gagasan neoklasi yang menitikberatkan pada persoalan modernisasi, sementara pemberdayaan masyarakat lebih menitikkan pada peran aktif masyarakat itu sendiri dalam memilih jalan pembebasan.

² Suryawati.

³ Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," 2007.

Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata kekuasaan (power). Pemberdayaan mendistribusikan kekuasaan dari 'kaum berdaya' kepada 'kaum tidak berdaya'. Pemberdayaan adalah suatu proses menolong kelompok atau individu yang dirugikan untuk bersaing dan berkarya secara efektif, karena semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam berkompetisi dalam sebuah 'permainan', dimana semua 'pemain' memiliki kesempatan untuk 'menang'.⁴ Konsep "pemberdayaan" berasal dari kata dasar "daya" yang mengandung arti "kekuatan", dan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "empowerment". Dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari, seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, dan kesehatan⁵.

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata daya yang memiliki arti kekuatan atau kemampuan. Berasal dari kata tersebut maka pemberdayaan bisa diartikan memberi suatu daya, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat yang kurang berdaya atau kurang mampu. Pemberian kekuatan atau keberdayaan ini tidak terlepas pelibatan masyarakat secara aktif, sehingga masyarakat bukan lagi menjadi objek melainkan sebuah subjek dari pemberdayaan itu sendiri. Tujuan dari pelibatan secara aktif ini adalah masyarakat sendiri yang akan melakukan pembangunan demi pemberdayaan dirinya. Selain itu tujuannya mereka merumuskan mulai awal hingga akhir proses pemberdayaan dan akan menjadi lebih bertanggung jawab atas kegiatan ini. Berbeda jika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif masyarakat akan menjadi objek dan kurang bertanggung jawab atas program pemberdayaan Masyarakat⁶.

Konsep pemberdayaan adalah memberikan daya kekuatan atas ketidakberdayaan dari pihak lain. Bisa juga diartikan memberikan kekuatan kepada suatu masyarakat untuk lebih kuat dan lebih berdaya atas segala hal. Pemberdayaan juga bisa diartikan mengembalikan kekuatan yang telah hilang, hilangnya kekuatan ini atas dominasi oleh pihak tertentu sehingga masyarakat kehilangan kekuatan. Ada dua makna dalam pemberdayaan yang bisa diartikan. Pertama pemberdayaan kedalam, artinya memberikan kesadaran serta mentransformasikan atas akses perbaikan kehidupan masyarakat. Kedua pemberdayaan keluar, yaitu memberikan Gerakan-gerakan perubahan atas apa yang menindas kehidupan masyarakat. Gerakan-gerakan ini bisa dilakukan seperti menentang kebijakan yang menindas dan sebagainya. Pemberdayaan yang bersifat keluar ini bersifat pengendali konflik atas penindasan ruang gerak dan ruang lingkup partisipasi masyarakat

⁴ Jim Ife and Frank Tesoriero, "Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* 265 (2008).

⁵ Hendrawati Hamid, "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat" (De la macca, 2018).

⁶ Oos M Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global* (Alfabeta, 2013).

dalam Pembangunan⁷. Gambaran sederhannanya yang dinamakan pemberdayaan masyarakat adalah aksi dari masyarakat yang melakukan sebuah Tindakan dalam lingkup kelompok-kelompok yang terorganisir. Dalam Tindakan yang terorganisir tersebut masyarakat melakukan perencanaan yang mengarah pada penyelesaian masalah yang dihadapi demi memenuhi kebutuhan dalam hidup dan mengembalikan kekuasaan atas sumber daya yang selama ini di kuasai orang lain. Selain pada sumberdaya alam, pemberdayaan masyarakat juga sesuatu alternatif pembanguan ekonomi melakuui kegiatan-kegiatan sosial. Model pembanguan ini disebut juga pembanguan yang melibatkan masyarakat (*participatory*), dan berkelanjutan (*sustainability*)⁸.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat tersebut adalah memberikan suatu kekuatan kepda kelompok yang lema. Sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan untuk dirinya sendiri dalam mengembangkan apa yang dimiliki atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun masalah yang dihadapi yang paling utama adalah sandang, pangan, dan papan yang menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Dalam hal mengembangkan dirinya, tujuannya adalah suatu kegiatan yang bersifat produktif yang bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi dirinya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan bagus. Dalam tatanan sosial, orang yang lemah dengan adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam suatu keputusan yang bisa memberikan pengaruh kepada kelompoknya⁹.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada kelompok yang lemah yang kurang memiliki daya, baik dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun kondisi internal. Dalam pengkategorian kelompok yang lemah setidaknya ada tiga lemah secara structural, lemah secara khusus, lemah secara personal. Lema secara struktur ini karena kondisi dalam sosialnya lemah baik secara kelas maupun secara etnis sosial. Lemah secara khusus karena faktor yang ada dalam diri manusia itu seperti karena tua, atau penyandang cacat. Sementara lemah secara personal karena disebabkan faktor dirinya sendiri dan keluarganya, sehingga mengalami kondisi yang lemah¹⁰.

2. Model Pemberdayaan Masyarakat Di Negara Berkembang

Akibat nyata dari kegagalan pendekatan pembangunan “sentralisasi” ini adalah ketimpangan kekayaan antara perkotaan dan perdesaan. Kota-kota besar seperti Jakarta adalah daerah yang paling merasakan manfaat dan paling maju, namun daerah pedesaan

⁷ Isbandi Rukminto Adi, “Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Masyarakat,” Jakarta: FE Universitas Indonesia, 2002.

⁸ Siti Nurhayatih, “Upaya Indonesia Dalam Mencapai Millennium Development Goals 2015: Studi Kasus Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2014” (Bakrie University, 2015).

⁹ Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,” 2009.

¹⁰ Asep Bambang Iryana, “Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Di Kecamatan Compreng Kabupaten Subang,” *Jurnal Academia Praja* 1, no. 02 (2018): 125–40.

umumnya memiliki sumber daya yang lebih banyak dibandingkan kota-kota besar. Pada masa Orde Baru, fokus pembangunan berada di Pulau Jawa dan Bali, sehingga tingkat pembangunan di daerah selain Jawa dan Bali rendah. Situasi ini menyebabkan daerah-daerah merasa terpinggirkan (tidak diperhitungkan) oleh program-program kebijakan yang bersifat top-down (dari pusat ke daerah).

Hal ini membuat masyarakat yang berada di daerah tersebut seolah-olah hanya menjadi penonton dan pembantu daerahnya. Situasi ini merupakan akibat wajar dari kebijakan yang hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tidak punya pilihan selain mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Sebagai contoh nyata, pada tahun 2014, sekitar 62 juta orang di Indonesia belum mendapatkan listrik, padahal pasokan listrik di kota-kota besar sangat mencukupi. Contoh lain pembangunan di wilayah Papua, yang masih sangat terbelakang, telah melahirkan gerakan-gerakan separatis. Dampak negatif masuknya ilmu ekonomi neoklasik antara lain: Pertama, adanya pembatasan kesempatan kerja. Sebab, ilmu ekonomi neoklasik lebih menekankan pada industrialisasi sehingga meminimalkan tenaga kerja berkedok efisiensi. Jadi paradigma ini sebenarnya bagus untuk efisiensi, tapi tidak untuk masyarakat egaliter secara ekonomi.

Kedua, dalam ilmu ekonomi neoklasik, kedaulatan ekonomi suatu negara dijamin karena seluruh sumber daya, termasuk sumber daya alam yang dimilikinya, dikomodifikasi (dijual) semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ketiga, kesejahteraan pekerja tidak terjamin. Keadaan ini terjadi karena negara-negara yang menerapkan ekonomi neoklasik sengaja menurunkan upah pekerjanya demi menarik investor asing. Adanya kondisi negatif tersebut di atas merupakan dampak dari masuknya ilmu ekonomi neoklasik yang mendewakan industrialisasi dan mewujudkan mekanisme trickle-down effect, serta masuknya konsep pemberdayaan masyarakat sebagai upaya membalikkan paradigma ekonomi neoklasik.

Paradigma pemberdayaan masyarakat didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan akan terjadi secara alami apabila masyarakat diberikan hak untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya untuk pembangunan masyarakat. Paradigma ini melahirkan tiga model pengembangan pemberdayaan: Yang pertama adalah model pengembangan Masyarakat¹¹. Model ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1920 oleh pemerintah kolonial Inggris di Etawah, India. Model ini dijadikan model pembangunan desa di negara-negara berkembang ketika baru saja memperoleh kemerdekaan politik dari negara-negara kolonial. Inti dari model ini adalah membekali penduduk pedesaan dengan keterampilan sosial, ekonomi dan politik untuk membangun masyarakat desa modern. Community development sebagai model

¹¹ Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 193–209.

pembangunan desa di negara-negara berkembang dinilai belum berhasil karena banyak programnya yang didominasi oleh warga desa yang berada. Kelemahan utamanya adalah model ini tidak memperhitungkan atau melupakan bahwa daerah pedesaan tidak homogen, ada yang kaya dan ada yang miskin. Kelompok kaya di pedesaan tidak hanya menguasai tanah dan sumber daya alam lainnya, namun juga mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan politik pedesaan.

Kedua, model partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mulai muncul pada awal tahun 1970an. Alasan utama munculnya model ini adalah semakin besarnya kekhawatiran para pemerhati pembangunan di negara-negara berkembang bahwa model trickle-down effect tidak dapat mencapai tujuan pemerataan hasil pembangunan. Model pembangunan partisipatif bertujuan untuk mendistribusikan hasil pembangunan secara lebih merata dan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dengan lebih cepat. Model ini gagal karena adanya langkah-langkah yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Banyak pejabat perencanaan yang masih percaya bahwa usulan program dan proyek pembangunan dari bawah tidak mempunyai arti penting dalam pembangunan dan hanya dianggap sekedar "daftar keinginan". Sebaliknya, apa yang dihasilkan pemerintah adalah "kebutuhan yang terealisasi" dari masyarakat.

Ketiga, ini adalah model desentralisasi. Dalam model ini, pemerintah pusat memberdayakan pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Meskipun model ini mengalami kemajuan, namun campur tangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan proyek masih sangat kuat, karena model ini tidak memberikan banyak manfaat jika keuangan pendukung pembangunan masih dikuasai oleh pemerintah pusat.

Menurut para ahli, kegagalan tersebut disebabkan oleh model pembangunan yang berlaku di negara-negara berkembang, yang tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai pemilihan, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu, paradigma pemberdayaan yang tepat berupaya mengubah situasi ini dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri¹².

Upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat, setidaknya memiliki tiga tahap. Tahap pertama adalah evaluasi. Tahap pengkajian merupakan tahap pertama yang perlu dilakukan untuk memetakan aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat dan potensi yang dimilikinya. Caranya dengan melakukan survei atau penilaian terhadap keadaan di wilayah atau desa tempat dilaksanakannya bakti sosial tersebut. Metode yang bisa dilakukan antara lain observasi

¹² Pajar Hatma Indra Jaya, "Trickle down Effect: Strategi Alternatif Dalam Pengembangan Masyarakat," *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (2012): 1–12.

(pengamatan langsung ke lokasi), wawancara mendalam dengan masyarakat calon mitra, dan penelitian literatur berdasarkan dokumen dan arsip milik desa. Tahapan ini memerlukan keterlibatan langsung masyarakat lokal dan partisipasi mereka dalam memberikan informasi tentang kondisi dan kondisi kehidupan mereka. Salah satu metode evaluasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah PRA (Participatory Rural Appraisal). Ciri khas PRA adalah kita selalu terbuka untuk menerima jalan dan metode baru yang kita anggap tepat, sehingga mudah diterapkan untuk mewujudkan potensi masyarakat kita. Dengan mengetahui potensi masyarakat, kita dapat menentukan metode apa yang cocok untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Tahap kedua adalah tahap pelatihan. Pada tahap kedua ini, masyarakat akan dilatih berbagai alat untuk melakukan latihan secara langsung. Pada tahap ini, praktisi dan ilmuwan yang berkualitas dilibatkan sebagai narasumber. Kegiatan pelatihan ini mirip dengan kegiatan konsultasi dimana Anda dilatih bagaimana menjadi seorang wirausaha dan berhasil mengelola suatu unit usaha.

Selanjutnya, kami akan menunjukkan kepada Anda beberapa eksperimen dan contoh bagaimana memulai mengelola area bisnis baru Anda, dan memberikan tips/strategi yang dapat Anda gunakan untuk memasarkan produk dan meningkatkan nilai penjualan. Selain itu, masyarakat dibekali pengetahuan bagaimana menciptakan inovasi produk yang dapat diterima masyarakat saat ini. Selain teori, kegiatan ini juga mengajarkan masyarakat praktek langsung dan membimbing masyarakat hingga menjadi mandiri dan berdaya. Tahap ketiga adalah evaluasi dan perbaikan. Setelah pelaksanaan program nirlaba, evaluasi harus dilakukan secara bertahap dengan memeriksa kemajuan di lapangan serta kesesuaian tujuan dan hasil. Apabila terjadi ketidaksesuaian, kami akan segera menyelidiki penyebabnya dan segera mengembangkan tindakan perbaikan. Tahap ini sangat penting dilakukan, mengingat kesalahan dalam penyusunan program sering terjadi. Oleh karena itu, kesalahan tersebut dapat segera diperbaiki pada tahap evaluasi ini.

Untuk mencapai tujuan dalam pemberdayaan masyarakat, ada beberapa cara pendampingan yang bisa kita gunakan. Diantaranya adalah sebagai berikut;

1. ABCD (*asset based community development*),¹³ merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pendayagunaan aset dan potensi masyarakat lokal (Maulana, 2019). Dalam pendekatan ini, masyarakat dipandang sebagai aset desa yang berharga. Secara sederhana, pendekatan ABCD dapat diartikan sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada aset lokal yang ada di suatu wilayah. Aset-aset tersebut dikembangkan untuk memecahkan permasalahan di wilayah dimana pemberdayaan dilaksanakan.

¹³ Ivis García, "Asset-Based Community Development (ABCD): Core Principles," *Research Handbook on Community Development*, 2020, 67–75.

2. *Participatory Action Research*¹⁴ Metode penelitian dan pengembangan partisipatif yang mengakui nilai hubungan sosial dan realitas pengalaman, pemikiran, dan perasaan kita. Penelitian ini mencoba menghubungkan proses penelitian dengan proses perubahan sosial. Studi ini menyadari bahwa proses perubahan merupakan topik yang dapat dieksplorasi. Penelitian ini membawa proses penelitian ke dalam lingkaran keprihatinan masyarakat, menemukan solusi praktis terhadap permasalahan umum dan permasalahan yang memerlukan tindakan dan pemikiran bersama, serta berkontribusi pada teori praktis. PAR melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan suatu masalah dan mempraktikkan informasi untuk memecahkan masalah yang ditentukan. PAR adalah "penelitian oleh manusia, dengan manusia, dan untuk manusia", bukan "penelitian tentang manusia". PAR mengharuskan masyarakat memainkan peran penting di dalamnya, memiliki informasi yang relevan tentang sistem sosial (komunitas) yang diteliti, dan berpartisipasi dalam perancangan dan implementasi rencana aksi berdasarkan hasil yang diperoleh. Dalam hal ini, PAR bersifat partisipatif. . belajar.
3. *community-based research*¹⁵ Hal ini dilakukan dengan adanya komitmen masyarakat untuk memberikan dukungan, sumber daya, dan partisipasi dalam proses penelitian sehingga menghasilkan hasil penelitian yang bermanfaat baik bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi peneliti yang terlibat dalam proses penelitian tersebut. untuk perubahan sosial dan dipromosikan di Masyarakat. Penelitian berbasis komunitas (CBR) bukanlah suatu metode atau pendekatan yang mendiktekan berbagai teknik pengumpulan dan analisis data, namun menjadikan masyarakat sosial sasaran sebagai bagian aktif dalam proses penelitian untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan data.
4. *Community Development*¹⁶ dapat diartikan sebagai "kegiatan pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan akses suatu masyarakat guna mencapai kondisi sosial ekonomi dan budaya yang lebih baik dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya". Kegiatan korporasi" (Budimanta, 2003), misi sosial-lingkungan adalah "memberikan nilai tambah terhadap nilai sosial-ekonomi pemerintah daerah, khususnya masyarakat sekitar" (Budimanta, 2003). Misinya adalah "sebagai alat pertukaran." hubungan antara perusahaan dan pemerintah kota, pemerintah daerah dan pihak terkait (stakeholder) (Budimanta 2003); Dengan mengedepankan interaksi yang baik antara pihak-pihak tersebut, tujuannya adalah untuk mencegah konflik antara masyarakat dan aktivitas perusahaan sedini mungkin.

¹⁴ Alice McIntyre, *Participatory Action Research* (Sage publications, 2007).

¹⁵ Meredith Minkler, "Community-Based Research Partnerships: Challenges and Opportunities," *Journal of Urban Health* 82 (2005): ii3–12.

¹⁶ Margaret Ledwith, *Community Development: A Critical Approach* (Policy Press, 2020).

5. *service-learning, and community*¹⁷ Merupakan metode pendidikan yang memadukan pengabdian masyarakat dengan tujuan pembelajaran akademik. Ini adalah proses menggabungkan pengabdian masyarakat sukarela dan refleksi aktif ke dalam kurikulum untuk memperkaya dan meningkatkan pembelajaran siswa. Hal ini meliputi (1) realitas, (2) refleksi, dan (3) interaksi. Realisme artinya kebutuhan masyarakat harus realistis dan konsisten dengan tujuan mata kuliah. Mahasiswa juga menghadapi permasalahan sosial tertentu selama melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Salah satu contohnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapinya, tercermin dari sikap apatis dan sulit menerima ide-ide baru. Refleksi kini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengukur dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pribadi mahasiswa. Ada hubungan timbal balik dimana mahasiswa dan masyarakat bekerja sama. Sekalipun kedua kelompok mempunyai pemahaman dan pengalaman yang berbeda mengenai muatan pendidikan, namun interaksi dari kedua sudut pandang tersebut akan saling memberikan kontribusi terhadap pengembangan masyarakat dan pengembangan kompetensi sosiokultural siswa.

3. Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Konsep pemberdayaan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ia mencontohkan terkait prinsip keadilan, kesetaraan, dan partisipasi sosial. Sikap toleran yang melekat ini telah dipraktikkan sejak masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, prinsipnya adalah selalu menjunjung tinggi etos kerja dan saling membantu (taawun) agar seluruh warga negara dapat mengamalkan ajaran agama. Kesetaraan dan persamaan kesempatan dalam berusaha menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial antara satu sama lain¹⁸.

Diantara prinsip-prinsip tersebut terdapat kaitan sangat erat yang selanjutnya akan dijelaskan lebih spesifik sebagai berikut: Kata keadilan merupakan kata ketiga yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an setelah Allah dan Ilm. Hal ini menunjukkan bahwa nilai fundamental ini sangat penting dalam Islam. Keadilan berarti kebebasan bersyarat dalam moralitas Islam, dan menafsirkannya sebagai kebebasan tanpa batas akan menghancurkan tatanan sosial pemberdayaan manusia¹⁹.

¹⁷ Rebecca Skinner and Chris Chapman, *Service-Learning and Community Service in K-12 Public Schools* (National Center for Education Statistics, 1999).

¹⁸ Achmad Saeful, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 3 (2020): 1–17.

¹⁹ Analisis Perilaku Konsumen Muslim dalam Hal, "Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Hal Trend Jilbab Perspektif Teori Konsumsi Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam Angkatan 2009

Asas kesetaraan adalah asas yang dilandasi oleh kesamaan keyakinan yang merupakan buah dari asas keadilan. Islam memandang setiap orang sebagai individu, bukan sebagai kelompok kolektif yang hidup dalam suatu negara. Seluruh manusia dengan segala perbedaannya adalah hamba Allah, dan tidak ada perbedaan kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai manusia. Faktanya, seluruh kebutuhan dasar manusia diatur secara menyeluruh, dan setiap orang juga diberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier tergantung pada tingkat kinerjanya²⁰.

Partisipasi merupakan inti dari pendekatan pemberdayaan masyarakat dan merupakan proses yang berkesinambungan, berkesinambungan dan interaktif. Prinsip partisipasi melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dan aktif sebagai jaminan penentuan bersama atas pembangunan, penghidupan, dan lingkungan mereka sendiri. Partisipasi sebagai kontribusi sukarela yang menciptakan harga diri dan meningkatkan kehormatan dan martabat menciptakan umpan balik yang memperluas zona dan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan Masyarakat²¹.

Etos adalah ciri-ciri, sikap, kebiasaan, dan keyakinan yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Yang dimaksud dengan “bekerja” meliputi segala bentuk amalan dan pekerjaan yang membawa unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Etos kerja dalam Islam merupakan hasil keyakinan umat Islam bahwa bekerja berkaitan dengan makna hidup seseorang, yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dalam kaitan ini, penting untuk ditegaskan bahwa Islam pada dasarnya adalah agama amal atau kerja (praktek)²².

Menurut bahasa ini, ungkapan “gotong royong” (ta'awn) berasal dari bahasa Arab yang artinya “berbuat baik”. Sedangkan menurut istilah ini adalah suatu perbuatan atau perbuatan yang hanya mencari keridhaan Allah SWT berdasarkan hati nurani. Karena mereka tidak mampu bekerja, Islam mewajibkan orang-orang di sekitar mereka untuk membantu mereka. Pemberian dana sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat kurang berdaya, sebagai kelompok yang lebih diuntungkan dibandingkan kelompok yang kurang beruntung. Mulai dari anak dan ahli waris, atau jika tidak ada yang mengasuhnya, maka orang terdekatlah yang wajib memenuhi kebutuhannya²³.

Secara garis besar, Islam menggunakan dua pendekatan dalam memperkuat masyarakat. Pertama, pendekatan kelanjutan parsial, yaitu pendekatan melalui pemberian bantuan langsung, seperti: B. Kebutuhan pokok, sarana dan prasarana. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang yang tidak mampu bekerja sendiri. Misalnya penyandang

IAIN Walisongo Semarang),” n.d.

²⁰ Taqyuddin An-Nabhani, “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,” 1996.

²¹ Aziz Muslim, “Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *Aplikasia* 8, no. 2 (2007): 89–103.

²² Arista Khairunnisa, “Implementasi Pariwisata Berkelanjutan Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Perspektif Islam: Studi Di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

²³ An-Nabhani, “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam.”

disabilitas tetap, orang tua lanjut usia, penyandang tunanetra dan lumpuh, serta anak-anak. Kedua, pendekatan terstruktur, yaitu dukungan yang berkesinambungan, terutama pengembangan keterampilan laten. Harapannya adalah mampu memberdayakan masyarakat yang kurang mampu untuk mengatasi kemiskinan dan kelemahannya sendiri. Bahkan, diharapkan mereka yang tertolong pada akhirnya menjadi pihak yang membantu²⁴.

Ada beberapa instrument dalam ekonomi islam yang bisa digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat, instrument- instrument tersebut adalah sebagai berikut;

1. Zakat ²⁵ adalah sarana Islam untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan. Keberadaan Zakat Fitra, Zakat Maal dan Zakat Profesi diharapkan dapat mengurangi tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia. Selain itu, Zakat juga dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mengatasi tantangan kemiskinan yang dihadapi di Indonesia melalui program Zakat produktif. Kitab Fiqih Zakat (Qardhawi, 2000) memuat antara lain tujuan Zakat dan dampaknya bagi penerimanya (Mustahik): 1. Zakat membebaskan penerimanya dari penderitaan dan memungkinkan mereka hidup damai dan meningkatkan ketaqwaan mereka kepada Tuhan. 2. Zakat menghilangkan rasa iri dan benci. Karakteristik ini mengurangi produktivitas. Daripada memerangi penyakit ini hanya melalui nasehat dan bimbingan, Islam berupaya memberantas penyakit ini dari masyarakat melalui mekanisme Zakat dan menggantikannya dengan persaudaraan saling peduli. Hafidhuddin (2005) menyatakan bahwa ulama seperti Imam Syafi'i dan An-Nasai mengatakan bahwa jika Zakat Mustahik mempunyai kemampuan berdagang maka hendaknya diberikan modal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. kebutuhan dasarnya sendiri. Demikian pula, jika orang-orang yang terlibat mempunyai keterampilan khusus, mereka dapat menyediakan sarana produksi yang sesuai untuk pekerjaan tersebut. Menurut Imam Syamsuddin al-Ramli, jika seorang mustahik tidak bekerja dan tidak mempunyai keterampilan tertentu, maka ia dapat memperoleh asuransi jiwa dari zakat, misalnya dengan menanamkan modal (dari uang zakat) pada suatu usaha tertentu. Pendapatan dari penjualan Zakat. Apabila penyaluran zakat lebih terfokus pada kegiatan produktif maka zakat dapat memberikan dampak yang lebih besar (multiplier effect) dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana dikemukakan Jamal (2004), penggunaan Zakat juga harus untuk investasi jangka panjang. Pertama, hal ini dapat berupa pendistribusian zakat untuk menjaga insentif bagi masyarakat miskin untuk bekerja dan memperoleh penghasilan sendiri. Kedua, minimal 50% dari zakat yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan produktif bagi masyarakat miskin, seperti mendanai berbagai kegiatan dan

²⁴ Syahrin Harahap, "Islam: Konsep Dan Implementasi Pemberdayaan," 1999.

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema insani, 2002).

pelatihan keterampilan produktif, serta pemberian modal kerja dan bantuan modal awal. Jika penyaluran zakat seperti ini bisa dilaksanakan maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan memperkecil kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

2. Infak²⁶ adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Secara etimologi, istilah infak memiliki dua makna pokok, yaitu, pertama, terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu. Kedua, tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu. Dari definisi tersebut, pengertian infak dalam hal ini adalah sesuatu yang terputus atau hilang. Karena makna kedua dari dua pengertian di atas mengarah kepada pengertian munafiq. Dalam terminologi syari'at, infak berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Surat al-Baqarah ayat 2-3.
3. Shodaqoh adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah atau shadaqah adalah mengamalkan atau menginfakan harta di jalan Allah. Namun, kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin, tetapi sedekah juga mencakup segala macam dzikir (tasbih, tahmid, dan tahlil) dan segala macam perbuatan baik lainnya.
4. Wakaf²⁷ secara umum dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang realisasinya dicapai dengan menjaga asal usul (taḥbīs al-aṣl) (harta) dan memanfaatkan manfaatnya untuk umum. Tujuan dipertahankannya hak milik semula (taḥbīs al-aṣl) adalah untuk menahan harta hibahan dari warisan (warisan, penjualan, hibah, hipotek, sewa, dan lain-lain). Pemanfaatannya adalah dengan memanfaatkannya secara cuma-cuma sesuai keinginan pemberi wakaf (wakaf) (Biro Pemberdayaan Wakf 2007). Wakf mempunyai dua fungsi. Yang satu sebagai ibadah kepada Allah dan yang satu lagi sebagai fungsi sosial terhadap sesama manusia. Fungsi wakaf sebagai ibadah dapat diartikan bahwa wakaf diharapkan dapat memberikan bekal bagi kehidupan wakif (donatur) di akhirat, karena pahalanya terus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan. Di sisi lain, fungsi sosial wakaf dapat diartikan sebagai aset yang berperan dalam mendorong pembangunan suatu negara. Wakaf berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan umat. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan pembayaran wakaf. Dasar hukum wakaf. al-quran. Tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara langsung menyebutkan atau mengatur tentang keberadaan wakaf secara umum atau wakaf produktif pada

²⁶ Hafidhuddin.

²⁷ Abdurrohman Kasdi, "Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif" (Idea Press, 2021).

khususnya. Namun ada beberapa bagian yang memberikan pedoman dan kini dapat dijadikan landasan hukum wakaf, baik wakaf langsung maupun wakaf produktif.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencapai kesejahteraan Masyarakat perlu dilakukan pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat yang dimaksud adalah memberikan keberdayaan terhadap Masyarakat yang mengalami ketertindasan oleh kaum yang mempunyai modal. Dalam ekonomi islam atau syariah dikenal ada beberapa instrument yang bisa di gunakan untuk memberdayakan Masyarakat diantaranya adalah zakat, infak, shadaqah, dan wakaf atau yang dikenal dengan ZISWAF. Ziswaf ini harus dikelola dengan baik agar kebermanfaatnya bisa di rasakan oleh orang-orang yang membutuhkan sehingga tercipta Masyarakat yang berdaya.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. "Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Masyarakat." *Jakarta: FE Universitas Indonesia*, 2002.
- An-Nabhani, Taqyuddin. "Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam," 1996.
- Anwas, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Alfabeta, 2013.
- dalam Hal, Analisis Perilaku Konsumen Muslim. "Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Hal Trend Jilbab Perspektif Teori Konsumsi Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam Angkatan 2009 IAIN Walisongo Semarang)," n.d.
- García, Ivis. "Asset-Based Community Development (ABCD): Core Principles." *Research Handbook on Community Development*, 2020, 67–75.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema insani, 2002.
- Hamid, Hendrawati. "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat." De la macca, 2018.
- Harahap, Syahrin. "Islam: Konsep Dan Implementasi Pemberdayaan," 1999.
- Ife, Jim, and Frank Tesoriero. "Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* 265 (2008).
- Iryana, Asep Bambang. "Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Di Kecamatan Comprong Kabupaten Subang." *Jurnal Academia Praja* 1, no. 02 (2018): 125–40.
- Jaya, Pajar Hatma Indra. "Trickle down Effect: Strategi Alternatif Dalam Pengembangan Masyarakat." *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (2012): 1–12.
- Kasdi, Abdurrohman. "Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif." Idea Press, 2021.
- Khairunnisa, Arista. "Implementasi Pariwisata Berkelanjutan Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Perspektif Islam: Studi Di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik

- Ibrahim, 2020.
- Ledwith, Margaret. *Community Development: A Critical Approach*. Policy Press, 2020.
- McIntyre, Alice. *Participatory Action Research*. Sage publications, 2007.
- Minkler, Meredith. "Community-Based Research Partnerships: Challenges and Opportunities." *Journal of Urban Health* 82 (2005): ii3–12.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," 2007.
- Muslim, Aziz. "Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Aplikasia* 8, no. 2 (2007): 89–103.
- Nurhayatih, Siti. "Upaya Indonesia Dalam Mencapai Millennium Development Goals 2015: Studi Kasus Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2014." Bakrie University, 2015.
- Saeful, Achmad. "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 3 (2020): 1–17.
- Skinner, Rebecca, and Chris Chapman. *Service-Learning and Community Service in K-12 Public Schools*. National Center for Education Statistics, 1999.
- Suharto, Edi. "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat," 2009.
- Suryawati, Chriswardani. "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional." *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 8, no. 03 (2005).
- Susilo, Adib. "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam." *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 193–209.